

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi dan perkembangan bisnis semakin membawa pengaruh yang besar terhadap segala bidang dalam kehidupan, terutama dalam dunia ekonomi. Salah satunya dalam perkembangan akuntansi yang semakin mengalami evolusi. Akuntansi secara menyeluruh dapat diartikan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan strategi bisnis perusahaan. Hasil suatu proses akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan suatu perusahaan (Kieso dkk, 2008:2).

Hal ini berarti metode akuntansi yang dipergunakan harus dapat diterima serta penyajiannya mencerminkan realitas kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan serta tidak boleh menyesatkan pemakai informasi laporan keuangan. Penyampaian informasi akuntansi disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan sebagai pengelola secara langsung dan biasanya diterbitkan secara periodik dalam tahun buku.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Baridwan, 2002:3). Biasanya para investor mengukur kinerja perusahaan

berdasarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan (laba) yang tercermin dalam laporan keuangan yang disajikan.

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan karena laba merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada para penyandang dana (*stakeholder*) dan juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang, karena nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan yang telah dijalankan oleh manajemen. Efektifitas manajemen dapat diukur dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi yang biasa disebut dengan profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Lukman, 2009:59). Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas ini lebih ditekankan karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang.

Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Apalagi informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, seperti investor, kreditur, pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Oleh karena pentingnya penyajian dan pelaporan mengenai laporan keuangan suatu perusahaan maka pihak manajemen sebagai pihak internal perusahaan berkewajiban menyusun laporan keuangan perusahaan secara transparan dan akurat serta dapat memberikan kebijakan-kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan laba yang tinggi, hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen, karena semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai pengelola secara langsung. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu pemilik (*stakeholders*) investor dalam mengestimasi *earnings power* (kekuatan laba) untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh. Situasi ini memungkinkan manajer untuk melakukan perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sri Sulistyanto,

2008:15). Sedangkan menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* (1993) dalam Hairu (2009:22) mengartikan “Manajemen Laba” yaitu :

Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasa laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) yaitu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan *stakeholders* (Hairu, 2009:1).

Pihak manajemen memiliki wewenang dan keleluasaan dalam memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pribadi dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak lagi mencerminkan kinerja manajemen yang sesungguhnya, namun telah direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan manajemen. Inilah yang disebut dengan *agency problem* (Sri Sulistyanto, 2008:132).

Watts dan Zimmerman (1986, 1990) dalam Yulianti (2004:10) mengajukan tiga hipotesis sehubungan dengan Teori Akuntansi Positif yaitu, *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost hypothesis*. Ketiga hipotesis ini didasarkan pada pemikiran bahwa manajer akan memilih standar akuntansi yang paling menguntungkan diri mereka sendiri mengenai laba yang diinginkan. Hal ini merupakan dasar pemikiran mengenai manajemen laba.

Menurut Mc Nichols dan Wilson (1998) dalam Wijaksono (2005) dalam Ilya (2006:835) menyatakan bahwa :

Praktek manajemen laba dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu : (1) manajemen akrual (*accruals management*), (2) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib (*adaption of mandatory accounting changes*), (3) perubahan akuntansi secara sukarela (*voluntary accounting changes*), (4) melalui kebijakan operasi, investasi dan pembelanjaan (*operating, investing, and financing policies*),

Adanya fleksibilitas dalam PSAK memungkinkan diskresi (pertimbangan) manajemen dalam akuntansi akrual. Dengan menggunakan fleksibilitas yang diperbolehkan standar akuntansi, manajemen dapat melakukan tindakan manajemen laba (*earnings management*) . Dasar akrual (*accrual basis*) disepakati sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, karena lebih rasional dan wajar dibandingkan dengan dasar tunai/kas (*cash basis*). Penggunaan *discretionary accrual* (kebijakan akrual yang berada di bawah kebijakan manajemen) dimaksudkan untuk menjadikan laporan keuangan lebih *informative*, yaitu laporan keuangan yang dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya. Tetapi kenyataannya, *discretionary accrual* ini telah disalahgunakan oleh manajemen, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka menaikkan atau menurunkan laba (Ilya, 2006:835).

Manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan akuntansi dan mempercepat atau menunda pengakuan biaya dan pendapatan agar lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya. Hal inilah yang memungkinkan pihak manajemen melakukan manajemen laba untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. Kasus kecurangan akuntansi melalui praktik manajemen laba telah banyak terjadi baik dalam negeri maupun dunia internasional.

Skandal besar perusahaan terkemuka di Amerika yaitu Enron dan Worldcom, sepanjang tahun 2002 bermula dari kecurangan berupa rekayasa laporan keuangan yang *overstated*, menyesatkan, dan membingungkan. Muaranya adalah pada angka rugi-laba yang disajikan yang telah di rekayasa, lalu secara otomatis mempengaruhi harga saham, selanjutnya kemerosotan kepercayaan masyarakat, dan berakhir pada kebangkrutan perusahaan. Peristiwa tersebut telah menamatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang semakin memudar.

Fenomena adanya kecurangan akuntansi juga terjadi di Bursa Efek Indonesia, yaitu kasus PT. Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT. Lippo mengindikasikan adanya praktek manajemen laba yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi laba. PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2002 mengindikasikan adanya praktek manajemen laba dengan menaikkan laba hingga Rp 31,7 milyar.

Praktik manajemen laba tersebut diduga terkait dengan keinginan manajemen lama untuk dipilih kembali oleh pemerintah guna mengelola perusahaan farmasi tersebut. PT. Indofarma Tbk pada tahun 2004 melakukan



praktek manajemen laba dengan menyajikan *overstated* laba bersih senilai Rp 28,870 Milyar, sebagai dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut *understated*. Target yang ingin dicapai adalah menaikkan laba (Bapepam 2004 dalam Ilya 2006).

**Tabel 1.1**  
**Kasus Manajemen Laba di Indonesia**

No.	Perusahaan	Kasus
1.	Sinar Mas Group	Melakukan pelanggaran kegagalan mengumumkan kepada publik informasi material berupa penandatanganan perjanjian penyelesaian dengan krediturnya, tidak mengumumkan laporan keuangan tahunan, dan tidak menginformasikan kepada Bapepam mengenai gugatan piutang dagang dalam jumlah yang cukup material.
2.	Indomobil	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa tender penawaran saham perusahaan ini mengandung praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang tender bekerja sama dengan penjual, penasehat keuangan, dan pendamping tender.
3.	Kimia Farma	Perusahaan diduga melakukan <i>mark up</i> laporan keuangan, yaitu menggelembungkan laba sebesar Rp 32.668 miliar. Kasus ini menyeret KAP yang mengaudit perusahaan ini meskipun KAP ini yang berinisiatif melaporkan adanya <i>overstated</i> itu.
4.	Lippo Bank	Menerbitkan 3 versi laporan keuangan sekaligus yang saling berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan dalam media massa, laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam, dan laporan keuangan yang disampaikan akuntan public kepada manajer perusahaan ini. Selain itu, perusahaan ini dinilai telah mencantumkan pendapatan audit secara tidak hati-hati.

(Sumber : Sri Sulistyanto, 2008:147)

Kasus PT. Kimia Farma Tbk sesuai dengan penelitian pada skripsi ini dimana pada tahun 2002 ditemukan penggelembungan (*mark up*) laba bersih pada laporan keuangannya dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan yang diduga berhubungan dengan kepentingan pribadi manajemen. Hal inilah yang menimbulkan praktik manajemen laba. Berdasarkan penyelidikan Bapepam,

disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma (audit 31 Desember 2001) telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Kasus yang terhangat hingga saat ini adalah kasus pajak yang dilakukan oleh Grup Bakrie, salah satunya adalah Kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. Bumi Resources Tbk dan PT. Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. Dimana KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Ditjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2007 untuk meminimalkan pajak ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)). Hal inilah yang dapat menimbulkan praktek manajemen laba yang berhubungan dengan pajak tangguhan dalam merekayasa penjualan untuk meminimalkan pajak yang dibayar.

Berbagai kasus kecurangan akuntansi yang telah terjadi pada intinya adalah memanipulasi laba dengan cara melakukan manajemen laba untuk kepentingan manajer khususnya maupun kepentingan perusahaan pada umumnya. Laba yang diinginkan oleh pihak manajemen tentunya laba yang tinggi setelah dikenakannya pajak secara keseluruhan. Untuk mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak, perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung, karena ada perbedaan antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak *external* perusahaan) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).



Laba akuntansi yaitu laba kotor dari pendapatan dikurangi dengan biaya, sedangkan laba fiskal yaitu laba kotor dikurangi pengeluaran/biaya yang boleh dikurangkan dari laba tersebut. Adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba sehingga mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangnya saldo akhir sehingga perlu dilakukan penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer yang terjadi antara laba akuntansi dengan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan (Santi dan Yulianti, 2009:4).

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan yang lebih ketat. Pada umumnya perusahaan menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui proses rekonsiliasi (Moh. Zain, 2007).

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Seperti yang diungkapkan oleh Scott (2000) bahwa salah satu motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan.

Ditambahkan menurut Ilya (2006:832) bahwa manajemen laba tidak dapat dilepaskan dari berbagai alasan atau justifikasi yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan. Misalnya, manajer dapat menggunakan estimasi mengenai kebijakan ekonomi di masa depan, seperti umur ekonomis, nilai sisa, penundaan pajak, dan taksiran kerugian piutang. Penundaan pajak sama halnya dengan beban pajak yang ditangguhkan, untuk mengatur besarnya pajak pada periode tertentu sesuai dengan kebijakan manajemen. Hal ini menciptakan dorongan bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dengan penundaan pajak (pajak tangguhan).

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986, 1990) bahwa alasan penghematan atau penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari tiga hipotesis sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu *Political Cost Hypothesis* sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sri (2008:45) menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat luas, maka akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Alasan ini mengenai masalah pelanggaran regulasi pemerintah, terutama pada Undang-Undang Perpajakan. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu sehingga membuat manajemen terdorong untuk melakukan praktik manajemen laba. Hal ini dapat dilakukan dengan cara,

menunda pendapatan dan mempercepat biaya untuk menghemat pajak salah satunya dengan merekayasa beban pajak tangguhan yang berhubungan dengan akrual sehingga memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba.

Palepu, Healy, Bernard (2000) dalam Yulianti (2004:4) menyatakan bahwa semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan “bendera merah” bagi pengguna laporan keuangan. Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal (Hawkins,1998 dalam Yulianti 2004:5).

Selain beban pajak tangguhan yang diduga mempengaruhi manajemen laba, adapun faktor lainnya yang diduga mempengaruhi manajemen laba adalah profitabilitas yang diukur dengan suatu rasio keuangan. Profitabilitas sebagai salah satu rasio keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan maupun pendapatan investasi selama periode tertentu. Profitabilitas ini lebih ditekankan karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka laba yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, hal ini akan berhubungan dengan jumlah kompensasi atau bonus yang akan diterima manajemen. Menurut Ilya (2006:833) pada saat keuntungan dijadikan sebagai patokan dalam pemberian bonus, hal ini dapat menciptakan dorongan kepada manajer untuk mengatur data keuangan agar dapat menerima bonus seperti yang diinginkannya. Jadi semakin perusahaan

memiliki profitabilitas yang tinggi maka manajemen semakin memiliki peluang untuk melakukan praktik manajemen laba.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986, 1990) bahwa alasan bonus melalui pencapaian profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dari tiga hipotesis sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu *Bonus Plan Hypothesis*. Insentif manajer pada umumnya didasarkan pada profitabilitas perusahaan, oleh karena itu profitabilitas dapat dijadikan indikasi dilakukannya manajemen laba dalam perusahaan sehingga profitabilitas dapat mempengaruhi praktik manajemen laba sebagai motivasi bonus.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sri (2008:45) menyatakan bahwa ada perusahaan yang menggunakan *bonus plan*, cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba saat ini. Dalam *bonus plan* tersebut, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu (profitabilitas perusahaan meningkat). Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus.

Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan manajemen laba karena manajemen mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba pada periode tertentu (Assih dkk, 2000 dalam Igan, 2007:5). Hal ini diperkuat dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Igan

(2007:12) bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba yang merupakan bagian dari praktik manajemen laba.

Beberapa peneliti lain mencoba mengatasi kelemahan model *accrual* dengan mencari faktor alternatif yang dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian Ini**

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam memprediksi Manajemen Laba	Yulianti (2004)	Penelitian ini menemukan bahwa kedua pengukur manajemen laba (akrual dan beban pajak tangguhan) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.	Yulianti menggunakan dua pengukur manajemen laba yaitu akrual dan beban pajak tangguhan dengan menggunakan analisis regresi probit. Variabel akrual yang diukur yaitu <i>Total Accrual</i> , <i>Modified Jones Model</i> , dan <i>Forward Looking Model</i> Sedangkan peneliti hanya menggunakan <i>Discretionary Accruals</i> untuk mengukur manajemen laba sebagai variabel terikat dan beban pajak tangguhan sebagai variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi manajemen laba dengan menggunakan analisis regresi berganda.
2.	Penggunaan Komponen-Komponen Pembentuk Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba : Sebuah Pendekatan Baru di Indonesia.	Irreza dan Yulianti (2010)	Penelitian ini menghasilkan bahwa total perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih dan total akrual dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas manajemen laba untuk menghindari kerugian. Penelitian ini pula menggunakan refleksi beban pajak tangguhan pada neraca, yaitu perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih yang	Dalam penelitian Irreza dan Yulianti menggunakan perubahan kewajiban pajak bersih yang terbagi menjadi dua, yaitu Aset pajak tangguhan dan Kewajiban pajak tangguhan yang menggunakan data sampel perusahaan manufaktur dan jasa tahun 1999-2008. Sedangkan peneliti hanya menggunakan komponen kewajiban pajak tangguhan

			menunjukkan bahwa hanya satu variabel komponen yang terbukti memiliki pengaruh signifikan, yaitu komponen depresiasi atas asset berwujud.	sebagai beban pajak tangguhan (sebagai variabel bebas) dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan data terbaru yaitu data sampel perusahaan manufaktur tahun 2010.
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba	Igan Budiasih (2007)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>dividend payout ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba. Sedangkan, <i>financial leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba.	Igan menggunakan 4 variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>dividend payout ratio</i> , dan <i>financial leverage</i> . Sedangkan peneliti hanya menggunakan profitabilitas dengan proksi ROA sebagai variabel independen yang merupakan tambahan variabel independen sebelumnya.
4.	<i>Earnings Management : New Evidence Based on Deferred Tax Expense</i>	Phillips, Pincus, &Rego (2003)	Penelitian ini menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan dan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mendeteksi manajemen laba untuk tujuan mencegah pelaporan kerugian dan untuk tujuan mencegah penurunan laba.	Phillips, et al melakukan penelitian dengan menggunakan distribusi laba untuk dua tujuan yaitu untuk tujuan mencegah pelaporan kerugian dan untuk tujuan mencegah penurunan laba. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba untuk tujuan mencegah pelaporan kerugian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Untuk itu, penulis mengambil judul :

**“Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba.”**



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba?
- 2 Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba?
- 3 Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan dan profitabilitas terhadap manajemen laba secara simultan?

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat diuraikan bahwa maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan dan profitabilitas terhadap manajemen laba secara simultan.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis

Untuk menambah wawasan mengenai gambaran teori dan praktik manajemen laba. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi tambahan terhadap penelitian selanjutnya.

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan yang positif bagi pengguna laporan keuangan bahwa terdapat hubungan antara penyajian jumlah beban pajak tangguhan dan profitabilitas dengan upaya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur dan sebagai masukan dalam menganalisis kualitas laporan keuangan perusahaan khususnya mengenai laba perusahaan yang dilaporkan.

